BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Adanya interaksi antara aktor atau negara yang melintasi batas-batas negara salah satunya ialah melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral, kerjasama bilateral dapat terbentuk dari berbagai bidang seperti salah satunya ialah kerjasama dibidang pendidikan hingga budaya.

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dimana sudah ada pada diri manusia sejak dilahirkan di muka bumi ini. Pengertian HAM menurut Jan Materson selaku Komisi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa selanjutnya disebut (PBB) adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia. Berbagai hak yang terdapat di Piagam PBB tentang Deklarasi *Universal of Human Rights* 1948 diantaranya ialah hak berpendidikan dan hidup berbudaya

(http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Tertuangnya hak memperoleh pendidikan dan hidup berbudaya di dalam Piagam PBB tentang Deklarasi *Universal of Human Rights* 1948 maka setiap manusia berhak memperoleh pendidikan dan hidup berbudaya. Adapun demi terwujudnya hak tersebut, setiap negara memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak masyarakatnya. Menurut Edgar Faure, pendidikan adalah salah satu tugas negara terpenting karena pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia yang istimewa. Pendidikan merupakan hak pribadi manusia yang berakar dalam aneka kebutuhan pokok manusia sebab manusia tidak bisa mengembangkan hidupnya tanpa pendidikan minimum dan bermutu (http://unisosdem.org/article/ diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Pendidikan memiliki peran penting untuk kemajuan sebuah negara, tahun 1972 *The International Comission for Education Development* dari UNESCO telah mengingatkan kepada negara-negara bahwa jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa harus dimulai dengan pendidikan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang membuat sebagian besar negara di dunia memberi prioritas tinggi akan pendidikan, mengadakan modernisasi dan penyempurnaan lembaga-lembaga pendidikan serta tidak segan-segan mengadakan pembaruan dibidang pendidikan (http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Oleh sebab pendidikan ialah hak setiap manusia dan pendidikan berperan penting dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia yang berperan sebagai salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara maju, maka tercapainya sumber daya manusia berkualitas menjadi hal utama yang dilakukan setiap negara termasuk Indonesia.

Dalam perjalanannya pendidikan Indonesia selalu mengalami perubahan-perubahan hingga saat ini Indonesia melaukan berbagai upaya demi membangun kualitas pendidikan. Adapun kondisi pendidikan Indonesia saat ini mutu pendidikannya nya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor pendidikan di Indonesia yang belum dapat berfungsi secara maksimal (http://www.beritasatu.com/pendidikan/393432-konsep-pendidi kan-di-indonesia-masih-tertinggal.html diakases pada tanggal 25 Mei 2017).

Dari sistem tersebut Indonesia masih mengalami permasalahan-permasalahan dibidang pendidikan, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan mencakup tiga pokok yaitu pemerataan pendidikan sebab pendidikan di Indonesia hanya dapat dirasakan oleh kaum menengah kemudian biaya pendidikan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk berdampak pula pada pendidikan di Indonesia yang banyak sekali anak tidak dapat mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan yang mahal dan pokok terakhir ialah kualitas pendidikan dimana permasalahan yang paling mendasar adalah masalah mutu pendidikan.

Kondisi pendidikan Indonesia saat ini sangat jauh tertinggal jika di bandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut di buktikan dengan banyaknya tenaga pendidik Indonesia yang mengajar namun tidak sesuai dengan bidangnya. Selain kondisi tenaga pendidik di Indonesia, masalah kedisiplinan dan kejujuran dari peserta didik masih rendah (https://www.academia.edu/18545509/Pengantar-pendidikan-12 diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Selain pendidikan, kehidupan berbudaya menjadi sebuah hak asasi manusia dan budaya memiliki peran dalam membangun bangsa dimana peran budaya dalam memajukan bangsa adalah dengan membentuk karakter dan moral bangsa sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa yang kaitannya bisa dijadikan citra sebuah negara untuk membangun daya tarik di dunia internasional. Namun kebudayaan ialah keseluruhan yang kompleks di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat. Karena kebudayaan lahir dari berbagai keanekaragaman maka kebudayaan sulit untuk diterima dan seringkali menimbulkan permasalahan dikarenakan perbedaan kebudayaan itu sendiri.

Oleh karena pendidikan dan kebudayaan ialah hak setiap manusia dan memainkan peranan yang sangat penting di setiap negara maka hal tersebut menjadi tugas negara dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak nya serta dapat memajukan negara tersebut, adapun Indonesia terus berupaya memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti dipaparkan di atas, maka Indonesia

memiliki inisiatif untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut salah satu nya ialah dengan negara Australia.

Kerjasama pendidikan dan budaya antara Indonesia dan Australia telah dimulai sejak tahun 1968 dengan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani tanggal 14 Juni 1968 di Jakarta. Australia memiliki program AusAID yaitu program badan utama pemerintah Australia dalam perang *global* untuk memberantas kemiskinan. Dalam menghadapi tantangan yang cukup besar tak terkecuali di kawasan Asia-Pasifik, pemerintah Australia mengintensifkan upaya untuk mencapai MDGs. Sebagai salah satu negara donor yang lebih besar di wilayah ini, Australia memiliki tanggung jawab khusus untuk membantu negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia (https://internationaleducation.gov.au/diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Bantuan AusAID di Indonesia dilaksanakan melalui proyek- proyek yang dikelola oleh kontraktor yang dipilih secara kompetitif berdasarkan Aturan Pemerintah Persemakmuran untuk penyediaan barang atau jasa, program ini adalah program antar pemerintah (*Goverment to Goverment*) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

AusAID memiliki proyek-proyek bilateral dan juga menyalurkan dana melalui badan-badan PBB, Lembaga Keuangan Internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional. AusAID juga mendukung Lembaga Swadaya

Masyarakat lokal dan berbagai kelompok masyarakat lain. Semua kegiatan program yang dibuat di Indonesia membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia (http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Adapun proyek-proyek Australia ialah memiliki dan menawarkan program kerjasama di berbagai bidang bantuan pembangunan di sejumlah sektor perekonomian Indonesia melalui AusAID. Bidang-bidang tersebut mencakup Pendidikan dan Beasiswa, bidang Kesehatan, Perubahan Iklim, Pemerintah, *Gender*, Pengurangan Resiko Bencana, Infrastruktur, Prodiktivitas Pedesaan, Desentralisasi dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari tujuan AusAID untuk menawarkan kerjasama termasuk pendidikan, AusAID memberikan dana sebesar $3.6 juta dari tahun 2011-20015 kepada Australia Indonesia Institute atau disingkat AII untuk program *Building Relationshipsm through Intercultural Dialogue and Growing Engangement* selanjutnya disingkat BRIDGE.

AII didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk menjadi wadah pengumpulan, pertukaran dan penyebaran informasi serta merupakan sumber sarana untuk mendukung, mempererat dan mengembangkan hubungan antara masyarakat Australia dan Indonesia.

AII yang berada di bawah naungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia mengundang permohonan dari Australia dan Indonesia untuk mengajukan proposal pendanaan berbagai proyek yang dirancang

untuk memberikan kontribusi terhadap hubungan Australia dan Indonesia yang lebih luas.

Program yang diajukan harus melibatkan gagasan baru yang sesuai dengan tujuan AII untuk mempromosikan hubungan yang terus berkembang dan semakin dalam antara Australia dan Indonesia. Permohonan bisa diajukan secara perorangan maupun organisasi. Dewan Pengurus AII dijadwalkan untuk mengunjungi Jakarta dan Surabaya pada bulan November 2008. Acara yang penting dalam kunjungan Dewan Pengurus AII ke Indonesia tahun 2008 adalah perayaan untuk memperingati ulang tahun ke-20 diresmikannya AII.

AII telah mendukung berbagai proyek di bidang seni, pendidikan, kepemudaan, masyarakat madani, antar-agama, media dan olah raga. Seluruh permohonan harus sudah diterima oleh Sekretariat AII pada 19 September 2008. Dari tujuan AII terdapat fungsi lembaga yaitu membuat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri dan Perdagangan akan pemahaman menyeluruh dari pengalaman masyarakat Australia tentang Indonesia, mensponsori kegiatan di bidang pertukaran budaya, olah raga dan pelatihan serta fungsi lainnya (http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/AII.html diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Berangkat dari fungsi dan tujuan dari AusAid dan AII yang berkesinambungan dengan isi kerjasama pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia-Australia, maka dibuatlah berbagai program seperti salah satunya ialah program BRIDGE. Program BRIDGE atau Pengembangan Hubungan Australia-

Indonesia melalui Dialog Antar-Budaya dan Peningkatan Kiprah berdiri sejak tahun 2008.

Program kerjasama Indonesia-Australia dalam program BRIDGE mendapatkan bantuan biaya yang diberikan sebesar $4.1 juta dari tahun 2011 hingga 2015. Biaya sebesar $3.6 juta berasal dari AusAID dan $500,000 oleh *The Myer Foundation*. Hingga saat ini terdapat sekitar 100,000 sekolah dasar dan sekolah tinggi di Australia dan Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari program pertukaran budaya dan bahasa melalui program BRIDGE yang serangkaian keseluruhan kegiatan pelaksanaan didanai oleh Pemerintah Australia (http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM13_006.html diakes pada tanggal 10 April 2017).

Program kerjasama Indonesia-Australia dalam BRIDGE dimulai sejak tahun 2008 dan berakhir di tahun 2012 kemudian diperpanjang hingga tahun 2016, ratusan sekolah telah mengikuti program BRIDGE di berbagai provinsi di Indonesia, adapun nama sekolah-sekolah yang sudah mengikuti diantaranya ialah di Jakarta terdapat SD dan SMA Al Izhar, SD dan SMA Santa Ursula, SD Pondok Labu 11, SD Kebon Jeruk 11, SMAN 8, SMA 70. Dari Jawa Timur diantaranya ialah SD dan SMA Cor Jesu, MAN 1 Malang, SMA Katolik Kolese Santo Yusuf, SMP Darul Ulum 1 Jombang dan dari Sumatera Selatan SMA Xaverius 1, SMAN 17 Palembang, SMA Negeri Sumatera Selatan dan Pondok Pesantren Darusalam (http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/.html diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Kegiatan dan tujuan dari program BRIDGE sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru-guru dan siswa-siswa Indonesia mengenai Australia kontemporer.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru-guru dan siswa-siswa Australia mengenai Indonesia dan sebaliknya, khususnya mengenai peran Islam dalam masyarakat kontemporer Indonesia.
3. Untuk mendukung penguasaan bahasa asing di sekolah-sekolah Indonesia dan Australia.
4. Untuk mendukung sebagian kecil kelompok sekolah BEP (Basic Education Program atau Program Pendidikan Dasar).
5. Menguasai teknologi *internet* dan melaksanakan pelatihan dasar (http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM12_002.html diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Kegiatan utama yaitu program kunjungan guru, untuk memberikan pelatihan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kemampuan berbahasa asing yang juga akan dimanfaatkan ketika pulang kembali ke Indonesia, pelatihan cara mengajar kreatif di sekolah Australia, pengembangan dan penyediaan sumber daya pelatihan *online* bagi guru-guru dan para murid, melakukan kegiatan pemahaman antar budaya seperti diadakannya pameran, bazar dan pementasan.

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan ialah dua orang guru dari masing-masing sekolah di provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta berkunjung ke Australia pada bulan Mei 2013 dimana mereka tinggal selama satu minggu untuk menjalankan program

peningkatan kapasitas dan selama dua minggu membangun kemitraan dan melihat program kegiatan belajar mengajar di sekolah mitra.

Dan dibuatnya sebuah program kelas Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia serta meningkatkan penguasaan bahasa asing antar negara, hingga kegiatan pelatihan *online* guru-guru dan para murid dengan menggunakan teknologi *internet* yaitu seperti penggunaan dengan *skype* untuk tetap berkomunikasi antar sekolah dan melaksanakan kegiatan seperti salah satunya ialah kegiatan mengajar (http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/.html diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Latar belakang terjalinnya kerjasama pendidikan antara Indonesia-Australia dikarenakan pada kenyataannya setiap bangsa dan negara memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dipenuhi oleh potensi setiap negara itu sendiri, keadaan yang demikian mendorong sebuah negara untuk saling mengadakan hubungan antar negara. Setiap negara memiliki posisi yang berbeda-beda baik dalam bidang ekonomi, keamanan, politik atau sumber daya manusia. Oleh karena itu setiap negara tidak dapat lepas dari keterlibatannya dengan negara lain dalam bentuk hubungan kerjasama antar negara (Suprapto, 2005 : 20).

Dengan adanya kerjasama pendidikan dan budaya yang termuat di dalam nota kesepahamanan yang terdiri dari :

1. Sebuah pertukaran dan pengembangan profesional pejabat, akademisi, ilmuwan, ahli, *auditor* pendidikan, *staff* pengajar dan administrasi dan mahasiswa.

2. Kerjasama dan pertukaran informasi mengenai pengembangan, sistem dan standar pendidikan *formal* dan *non-formal* dan sistem audit di setiap Negara.
3. Kerjasama dan pertukaran informasi mengenai reformasi pendidikan dan fasilitasi pengakuan kualifikasi pendidikan dan *profesional* masing-masing dan mobilitas siswa atau *staff*.
4. Pertukaran informasi tentang kesempatan belajar di setiap negara untuk warga negara di negara lain.
5. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian kedua negara dalam penyampaian, program penelitian dan publikasi bersama termasuk pertukaran materi penelitian dan *literature* pendidikan.
6. Interaksi melalui pertemuan, konferensi dan simposium yang menjadi kepentingan kedua negara (https://internationaleducation.gov.au/About-AEI/Government-Relations/ diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

Dari kerjasama tersebut maka dibuatlah berbagai program yang dilaksanakan oleh AusAID dan AII seperti salah satunya ialah program BRIDGE. Melalui program BRIDGE yang dilakukan antara Indonesia-Australia diharapkan dapat mencapai kepentingan nasional kedua pihak, meningkatan kualitas pendidikan Indonesia, bertambahnya daya tampung beasiswa Indonesia ke Australia hingga terciptanya pemahaman budaya antar kedua negara.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji Kerjasama Pendidikan Indonesia-Australia dalam program BRIDGE, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian

terdahulu yang akan digunakan oleh peneliti adalah pertama penelitian yang dilakukan oleh Dyah Setia Ningsih dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "Dampak Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Australia Dalam Bidang Pendidikan Tahun 2003-2008".

Dalam penelitian tersebut, Dyah Setia membahas latar belakang yang menyebabkan Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia serta dampak dari kerjasama pendidikan tersebut. Persamaan dengan penelitian Dyah adalah sama-sama meneliti pendidikan Indonesia dan kerjasama pendidikan dengan Australia. Sedangkan perbedaan terletak dari fokus penelitian yang dilakukan Dyah ialah dampak kerjasama pendidikan di tahun 2003-2008 sedangkan peneliti meneliti bagaimana kerjasama pendidikan dalam program BRIDGE pada tahun 2008-2016.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ana Wiyatiningrum dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd 2007-2013) dalam penelitian ini, Dwi membahas program-program yang dicanangkan oleh Kevin Rudd dalam pemilu Australia 2007, kebijakan-kebijakan Kevin Rudd terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia serta membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pada masa transisi kepemimpinan Kevin Rudd.

Persamaan dengan penelitian Kevin ialah sama-sama meneliti hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia sedangkan perbedaanya ialah Dwi membatasi penelitian dengan membahas hubungan bilateral pada masa kepemimpinan Kevin Rudd sedangkan peneliti membahasa hubungan bilateral pada tahun 2008-2016.

Penelitian ketiga ialah penelitian Cyhntia Magdalena Sinaga dari Universitas Hasanuddin dengan judul " Dinamika Hubungan Indoesia-Australia Dalam Bidang Politik 2010-2015), penelitian ini membahas berbagai penyebab masalah hubungan Indonesia dengan Australia adapun persamaan dengan penelitian Cyhntia ialah mempelajari negara Australia dan hubungannya dengan Indonesia sedangkan perbedaanya ialah Cyhntia membahas dinamika hubungan kedua negara sedangkan peneliti meneliti bagaimana kerjasama pendidikan Indonesia-Australia melalui program BRIDGE.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana kerjasama pendidikan Indonesia-Australia melalui program BRIDGE serta proses dan dampak dari kerjasama program BRIDGE, dimana pendidikan ialah salah satu fondasi penting suatu negara dan pemahaman antar budaya dengan berbagai kegiatannnya dapat memberikan dampak baik bagi kedua negara, adapun kedua negara tersebut menjalin kerjasama tentu didasari dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Berdasarkan alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia-Australia dalam Program *Building Relationships Through Intercultural Dialogue And Growing Engagement* (BRIDGE) 2008-2016)".

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional, dalam mata kuliah ini diberikan pengetahuan mengenai adanya sebuah kerjasama antar negara, sehingga dapat dijadikan landasan peneliti dalam mempelajari adanya sebuah hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia-Australia
2. Analisis Politik Luar Negeri, sebagai acuan dasar peneliti dalam memahami poitik luar negeri dan membantu peneliti memahami bagaimana penentuan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara dan juga interaksi melalui hubungan bilateral.
3. Dinamika Politik Internasional, Mata kuliah ini memberikan pemahaman terhadap dinamika suatu politik internasional beserta struktur dan proses yang berlangsung didalamnya, dalam mata kuliah ini peneliti mengaitkan bagaimana analisis politik luar negeri antara Indonesia dengan Australia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia-Australia dalam program *Building Relationship Through Intercultural Dialogue And Growing Engagement* (BRIDGE) tahun 2008-2016?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana strategi pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program *Building Relationship Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement* (BRIDGE) tahun 2008-2016?

2. Apa kendala dari pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program *Building Relationship Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement (BRIDGE*) tahun 2008-2016?
3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program *Building Relationship Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement (BRIDGE) tahun 2008-2016?*

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi waktu dalam kurun waktu tahun 2008-2016. Tahun 2008 merupakan awal berlakunya program kerjasama BRIDGE antara Indonesia dan Australia hingga tahun 2012, dengan beberapa hasil kerjasama yang kemudian dilanjutkan kembali penandatanganan pada tahun 2012 yang berlaku hingga tahun 2016. Tahun 2008-2016 telah dilaksanakan program-program kerjasama yang mendukung pertukaran pelajar dan guru, peningkatan mutu pendidikan hingga pertukaran budaya antar negara Indonesia dan Australia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat umum mengetahui Program Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia-Australia dalam program *Building Relationships Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa strategi pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan dalam program *Building Relationship Through Intercultural Dialogue And Growing Engagement (BRIDGE)* Indonesia-Australia.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan dalam program *Building Relationship Through Intercultural Dialogue And Growing Engagement (BRIDGE).*
3. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Kebudayaan dalam program *Building Relationship Through Intercultural Dialogue And Growing Engagement* (BRIDGE).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka serta dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Kerjasama Pendidikan Indonesia-Australia melalui program BRIDGE.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih *modern*. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya.

Di dalam suatu negara paling sedikit terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional. Ilmu Hubungan Internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar *individu* dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Suatu hubungan internasional ini dapat terjadi, pastinya terdapat faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong kerjasama antar negara yang nantinya kerjasama tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut negaranya masing-masing. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut.

Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa. Perwita dan Mochammad Yani menyatakan bahwa :

> "Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori,

konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya. Perkembangan kajian dan ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dewasa ini terbilang sangat pesat.

Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat, kini telah mengalami pergeseran dimana munculnya aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing-masing memiliki peran yang sama penting. Aktor dari hubungan internasional tersebut bisa merupakan *state actor* maupun *non-state actor*. Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani adalah sebagai berikut:

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan Internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep Pengaruh. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional. Berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy,2002 : 12).

Secara umum, kerjasama internasional ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000 : 45).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri.

Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsill,2008 : 21).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations*. Europe, America, *and Nontariff Barriers to Trade* bahwa :

> kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006 : 6).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Menurut Perwita & Yani bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain :

> "dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral" (Perwita & Yani, 2005 : 33).

2.1.3 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Dari definisi tersebut bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerja sama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. kerjasama bilateral yang terjalin antar 2 negara agar dapat saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara juga demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara.

Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap kerjasama bilateral mengandung kepentingan- kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Menurut Muhammad Iqbal Fadillah membangun saling pengertian antar negara , Fadillah mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama Bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang- bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing" (Fadillah,2005 : 1).

Jadi, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudi, 2002 : 116).

Menurut Hans Morgenthau kepentingan nasional adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling utama bagi kelestarian negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur kebutuhan yang sangat utama bagi negara yaitu mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Karena tidak ada *interest* secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintah, maka konsepsi ini dapat lebih akurat jika dianggap sebagai "*national interest*". Manakala sebuah Negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak dihiraukan sama sekali terhadap prinsip-prinsip *moral universal*, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijaksanaan realis, berlawanan dengan kebijakan idealisyang memperhatikan prinsip moral internasional.

Kepentingan nasional suatu negara dalam kurun waktu tertentu berbeda dengan kurun waktu lainnya, sehingga mengakibatkan keadaan politik internasional selalu berubah-ubah. Akan tetapi bagaimanapun juga perubahan politik internasional, kebijakan luar negeri harus selalu mengabdi kepada kepentingan nasional. Unsur fundamental politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu: tujuan nasional yang ingin dicapai dan *instrument* yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai dapat dilihat pada kepentingan nasional suatu negara, sedangkan *instrument* untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri (Kamus Hubungan Internasional Putra A Bardin, 1999).

Adapun salah satu bentuk dari kepentingan nasional ialah dibuatnya bentuk kerjasama *partnership*. Menurut pendapat Eisler, Rione & Montuori, Alfonso ada beberapa model hubungan kemitraan, yaitu: Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam

melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.

Dan ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setara dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemberian bantuan beasiswa Pemerintah Australia kepada pelajar Indonesia, sumbangan dana dan sebagainya terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia dapat memberi manfaat pada kedua belah pihak baik Indonesia dan Australia dalam aspek politik-keamanan, sosial budaya dan ekonomi.

Kerjasama dalam bidang pendidikan didasari oleh latar belakang sumber daya (fisik-geografis, sosial, ekonomi) yang banyak memiliki perbedaan antara kedua negara, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan bersama seperti dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, kepentingan ekonomi, menghindari konflik antara negara serta perasaan saling mempercayai dan saling menghormati kedua negara dalam aspek sosial budaya.

Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan dan manfaat ekonomi lainnya, namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya akses seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara, serta

saling menguntungkan (http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9940.pdf diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

2.1.5 Kebudayaan dan Pendidikan dalam Kajian Hubungan Internasional

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat.

Melville J.Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang kemudian disebut Superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius dan lain-lain yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang menjadi ciri khas suatu masyarakat (Eppink, 2013: 3). Menurut Selo

Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaranigrat, kebudayaan dapat diartikan sebagai:

> "Seluruh total dari hasil pikiran, cipta, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang karena itu hanya bias dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Kebudayaan dalam dimensi ini mencakup hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya" (Koentjaraningrat. 2002: 17).

Kemudian pada tanggal 26 Juli hingga 6 Agustus 1982 telah diadakan *World Conference on Cultural Policies* di Mexico City yang disponsori oleh UNESCO . Konferensi ini menghasilkan suatu kesepakatan bahwa : kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat (http://www.culturalrights.net/en/documentos.php. diakses pada 30/09/2013).

Untuk melihat bagaimana sesungguhnya kebudayaan itu, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok,

yaitu: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.

2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:

a) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.

b) Organisasi ekonomi

c) Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)

d) Organisasi kekuatan (politik) (Koentjaraningrat, 2002:13).

Dengan berkembangnya sektor kebudayaan dan kepariwisataan maka dengan sendirinya akan mendorong terwujudnya pencapaian perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja, revitalisasi institusi ekonomi serta peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat. Di samping itu pembangunan bidang ini akan meletakkan dasar kuat bagi terbentuknya jati diri dan karakter bangsa. Hal ini penting untuk disadari karena di era globalisasi ini setiap negara berlomba mendapatkan kedudukan di tingkat internasional.

Adapun konteks pendidikan, dalam hubungan internasional yang dijelaskan dalam buku "Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer" yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

"Dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seperti itu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkunan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang terjadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (2009 : 34).

Adapun keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional. Seperti yang disebutkan oleh *The United Nations Educational, Scientific* dan *Cultural Organization (UNESCO)* menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi internasional melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka penghormatan *universal* lebih lanjut untuk keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia bersama dengan kebebasan dasar yang diproklamirkan dalam Piagam PBB.

Pendidikan secara kelembagaan sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia. Ini menunjukkan sebuah hasil dari perkembangan menuju ke modernisasi produk sejarah dari tiga peristiwa penting dalam pusat Perang Dunia II. Pertama adalah kemunculan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Di tahun 1950-an Amerika Serikat memainkan tanggung jawab dalam mengatur dunia. Kedua ada sebuah penyebaran sekelompok pergerakan komunis dunia. Ketiga ada disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin memberikan kemerdekaan untuk negara baru di dunia. Ketiga hal tersebut memberikan pandangan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya membangun kekuatan politik oleh negara yang memenangkan Perang Dunia ke II.

Dimana pasca Perang Dunia ke II, negara-negara maju tidak lagi menggunakan konflik fisik untuk membangun kekuatan tapi lebih kepada pengembangan pendidikan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara lain. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pendidikan tidak dapat terlepas dari nuansa politik bahkan hal keagamaan seperti fatwa sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa politik (Salim & Azra, 2003: 168).

Pendidikan sebagai usaha sadar yang memerlukan tujuan, tanpa adanya tujuan maka pelaksanaan pendidikan tidak akan teratur. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan dan hasil yang diharapkan dalam proses pendidikan tersebut.

Hal ini merupakan kewajiban untuk pemerintah baik secara hukum ataupun politik dalam hal untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas yang baik serta untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan. Pendidikan adalah sebuah alat yang ampuh dimana anak-anak ataupun orang dewasa yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan perpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara. Katarina Tomasevski, mengemukakan empat ciri-ciri yang esensial dalam mengukur tingkat kualitas pendidikan dan perlu diperhatikan baik untuk *primary education*, *secondary education*, maupun *higher education*. Empat ciri-ciri itu adalah:

a. *Availability* (ketersediaan), dimana pendidikan harus tersedia dalam jumlah memadai, seperti bangunan sebagai perlindungan fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan teknologi informasi).

b. *Accessibility* (dapat diakses), pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksebilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yakni: (a) semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, (b) aksesbilitas fisik atau gedung sekolah harus aman, dan (c) biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.

c. *Acceptability* (dapat diterima), bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.

d. *Adaptability* (kesesuaian), pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespons kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya (Jayadi, 2005: 22-25).

2.2 Kerangka Pemikiran

Di dalam Piagam PBB tentang Deklarasi *Universal of Human Rights* 1948 tertuang hak-hak asasi manusia seperti yaitu hak berpendidikan yang terdapat di pasal 26 dan hak kehidupan berbudaya di pasal 27. Setiap hak-hak tersebut ialah tugas wajib negara dan demi pencapaian tersebut maka negara wajib berupaya demi tercapainya hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan dan kehidupan berbudaya.

Disamping pendidikan menjadi hak setiap manusia, pendidikan juga memainkan peran penting bagi suatu negara dan bangsa dimana pendidikan berperan dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan mampu menjadikan

bangsa menjadi manusia yang benar-benar manusia yang mengerti akan potensinya, mengenal Tuhan dan dapat mengantarkan manusia menjadi manusia yang memandang manusia lain seperti dia memandang dirinya sendiri.

Pendidikan mengajarkan perilaku yang benar atau mengajarkan sikap bagaimana memiliki budi pekerti yang luhur sehingga dapat membentuk bangsa yang beradab. Pendidikan berperan penting pula dalam meningkatkan kulitas sumber daya manusia dimana sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengatur dan mengolah sumber daya alam yang ada dengan baik sehingga dapat pula menjadikan negara nya sebagai negara maju sebab salah satu syarat negara maju ialah dinilai dari kulitas sumber daya manusia itu sendiri.

Budaya dapat pula dijadikan sebagai usaha untuk memajukan negara dengan membangun citra budaya yang baik dan memperkenalkan budaya yang beraneka ragam di Indonesia ke dunia luar maka akan membuat Indonesia dikenal dengan berbagai ragam budaya yang bisa “dijual” untuk pencitraan baik Indonesia,pengenalan negara Indonesia sehingga berdampak pula dengan perekonomian Indonesia.

Namun kenyataan dalam pelaksanaannya kualitas pendidikan masih sangat rendah, masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan biaya dan tidak meratanya pendidikan, infra struktur yang kurang memadai hingga kualitas guru yang tidak memadai. Budaya Indonesia pun kurang “ditunjukan” sebagai salah satu upaya pembentukan citra Indonesia. Namun dalam perjalanannya, keanekaragaman budaya setiap negara dapat pula menyebabkan

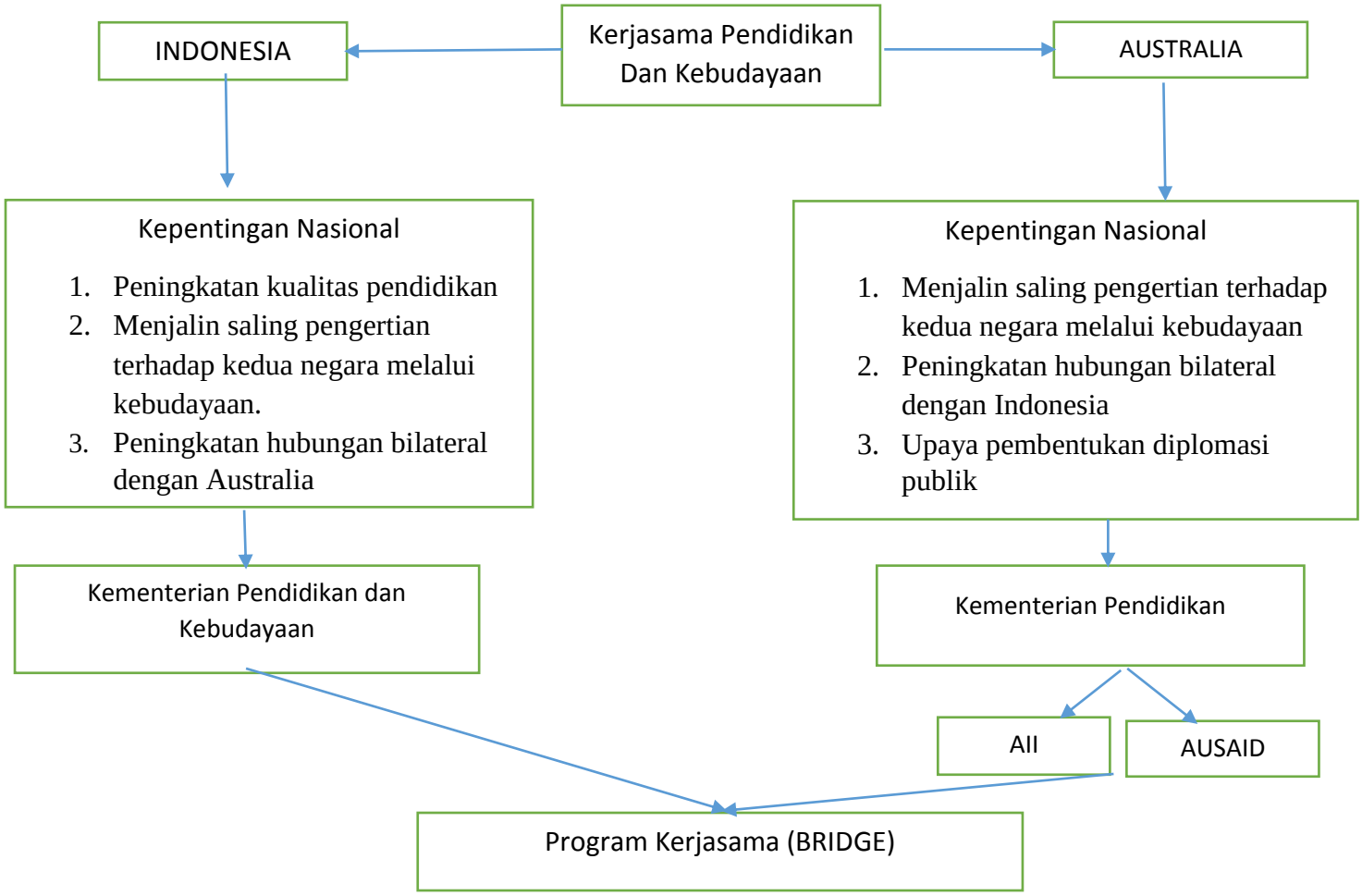
permasalahan akibat tidak adanya saling pengertian dan pemahaman budaya antar negara.

Untuk mengatasi berbagai kekurangan dan hambatan itu pemerintah mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju seperti melakukan kerjasama pendidikan dan budaya dengan negara-negara lainnya salah satu nya ialah Australia. Kerjasama Indonesia dan Australia dibidang pendidikan dan budaya telah terjalin sejak tahun 1968 dengan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani tanggal 14 Juni 1968 di Jakarta.

Dalam kerjasama tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia memiliki kepentingan nasionalnya yaitu peningkatan kualitas pendidikan, menjalin saling pengertian terhada kedua negara melalui kebudayaan hingga peningkatan hubungan bilateral dengan Australia.

Sedangkan Australia memiliki kepentingan nasional yaitu menjalin saling pengertian terhadap kedua negara melalui kebudayaan, peningkatan hubungan bilateral dengan Indonesia hingga melakukan diplomasi publik di Indonesia. Dari kerjasama bilateral tersebut terdapat berbagai program kerjasama salah satunya ialah program BRIDGE, program kerjasama dibidang pendidikan dan kebudayaan yang dibentuk tahun 2008 hingga 2016 melalui antar pemerintah yang ditandatangi oleh antar kementerian pendidikan dan kebudayaan, program BRIDGE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan antar guru dan murid hingga pemahaman antar budaya. Program ini diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan nya dan dapat menjadi alat untuk kedua negara mencapai kepentingan nasional masing-masing.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran